



**LURAH DLINGO**

KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN DLINGO

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN (LPPKal)

KALURAHAN DLINGO AKHIR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DLINGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Lurah adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan oleh Lurah yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) akhir tahun;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Kalurahan Dlingo Akhir Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  - 3. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No, 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguna Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
19. Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Evaluasi Desa;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 112);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Bantul No. 131 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131);
23. Peraturan Bupati Bantul No. 180 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 180);
24. Peraturan Bupati Bantul No. 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
25. Peraturan Bupati Bantul No. 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023;
26. Peraturan Bupati Bantul No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan;
27. Peraturan Bupati Bantul No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program

Pembangunan Partisipatif Masyarakat  
Kalurahan;

28. Peraturan Kalurahan Dlingo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Dlingo Tahun 2019 Nomor 03);
29. Peraturan Kalurahan Dlingo Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Dlingo (Lembaran Kalurahan Dlingo Tahun 2020 Nomor 06);
30. Peraturan Desa Dlingo Nomor 8 tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
31. Peraturan Kalurahan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, PamongBadan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan Dlingo (Lembaran Kalurahan Dlingo Tahun 2022 Nomor 11);
32. Peraturan Kalurahan Dlingo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Dlingo Tahun 2022 Nomor 12);
33. Peraturan Lurah Dlingo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Dlingo Tahun 2022 Nomor 13).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DLINGO  
Dan  
LURAH DLINGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PENYELENGGARAAN KALURAHAN (LPPKal)  
KALURAHAN DLINGO AKHIR TAHUN 2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Dlingo;

2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJMKal adalah Rencana Kegiatan pembangunan Kalurahan jangka waktu 6 (enam) tahun;
5. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kal adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

## BAB II SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

1. Laporan Kalurahan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Visi dan Misi Kalurahan
- E. Strategi dan Kebijakan

### BAB II : GAMBARAN UMUM

- A. Pemerintah Kalurahan
- B. Gambaran Umum Kalurahan
- C. Kondisi Ekonomi Kalurahan
- D. Kebudayaan
- E. Kesenian

### BAB III: LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

- A. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Dlingo Tahun Anggaran 2023
- B. Rincian Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Dlingo

### BAB IV : TUGAS PERBANTUAN

- A. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- B. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)
- C. Bantuan Pembangunan Jamban dari Dinas Kesehatan

### BAB V : KEBERHASILAN YANG DICAPAI DAN KENDALA YANG DIHADAPI

- A. Keberhasilan yang dicapai
- B. Permasalahan yang dihadapi
- C. Upaya Penyelesaian Masalah

### BAB VI: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Ucapan Terima Kasih

LAMPIRAN:

Isi dan Uraian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Dlingo Akhir Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.

BAB III  
PENUTUP

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di : Dlingo  
Pada tanggal : 8 Maret 2024  
LURAH DLINGO,

ttd

AGUS PURNOMO

Diundangkan di : Dlingo  
Pada tanggal : 8 Maret 2024  
CARIK DLINGO,

ttd

MOH. SAMSYUL MALIK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



LEMBARAN KALURAHAN DLINGO TAHUN 2023 NOMOR 03  
NO.REG (.....)

